

SEKILAS MEDIA

Sumut Pos
Kamis, 7 April 2011

“Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2011 : Medan Tunggak Pajak Rp7,56 Miliar”

Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, menyerahkan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2010 kepada Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/4). Dari ikhtisar tersebut, laporan keuangan Pemprov Sumut belum termasuk yang diaudit. Hanya saja sejumlah kabupaten/kota sudah dilakukan pemeriksaan. Di Kota Medan, BPK menemukan tunggakan pajak per 31 Agustus 2010 senilai Rp7,56 miliar belum terselesaikan.

Seputar Indonesia
Rabu, 13 April 2011

“BPK Soroti Kinerja Dinkes : DPRD Padangsidimpuan Wacanakan Bentuk Pansus”

BPK menyoroti kinerja dan pelayanan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemko Padangsidimpuan. Pelayanan instansi ini dinilai tidak tepat sasaran dan belum maksimal. Ada sepuluh temuan BPK mengenai sistem pelayanan kesehatan di Kota Padangsidimpuan, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Padangsidimpuan, Hamdani Nasution.

Sinar Indonesia Baru
Senin, 18 April 2011

“FPD DPRDSU Desak KPK Usut Proyek Kanal Rp600 M Diduga Sarat KKN”

Anggota FP Demokrat DPRD Sumut, Drs. Tahan Manahan Panggabean, M.M., mendesak BPK dan KPK segera mengaudit serta mengusut proyek pembangunan Kanal Flood Control di Kawasan Titi Kuning Marindal Medan senilai Rp600 M karena pembangunan diduga sarat KKN sebab tidak dapat difungsikan untuk mengatasi banjir Kota Medan.

Sinar Indonesia Baru
Jumat, 29 April 2011

“Puluhan Pemuda Forum Anti Korupsi Unjuk Rasa ke BPK Perwakilan Sumut dan Kejatisu”

Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Forum Anti Korupsi (FORAK), PPRM, Pembebasan, Jas Merah dan SDRM unjuk rasa ke kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kamis siang (28/4). Dalam pernyataan sikapnya itu mereka meminta BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan hasil audit normatif dugaan korupsi di Deli Serdang yang sudah berlarut-larut kasusnya.



REDAKSI

Mikael PH Togatorop (mt),

Barani M Silalahi (bs), Hj.Sri Madonna (sm), Hj.Ony Mauli (oni), Parulian (uli), Monika (mon),

Ermila Oecthari (mil), Suhendri (henz), Totok (ttk), Ardhyan (ard), Arief R (arra),

Diah Kusumawati Rukminingtyas (dkr)

ALAMAT REDAKSI : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Lt. IV, Jl. Imam Bonjol No.22 Medan

Telp. 061-4519039 ext. 321



DARI REDAKSI

MENDORONG TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan agenda rutin BPK RI selaku lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini bukanlah hanya sebatas pada formalitas saja tetapi menjadi bagian penting demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Setiap pemerintah daerah tentu saja mengharapkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD-nya. Namun perlu disadari opini ini bukanlah tujuan utama tetapi bagaimana mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bersih dan akuntabel adalah hal yang harus lebih diperhatikan. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP belum tentu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sampai saat ini belum ada satu pemerintah daerah pun di Provinsi Sumatera Utara yang mendapatkan opini WTP.

Pemeriksaan BPK RI akan bermanfaat apabila rekomendasi yang diberikan dapat menjadikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pemerintah menjadi transparan dan akuntabel sehingga tata pemerintahan yang baik (*good governance*) akan benar-benar terwujud, tidak hanya sebatas angan-angan belaka. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Oleh karena itu, akuntabilitas laporan keuangan merupakan aspek penting untuk mendorong terwujudnya *good governance* di negara kita tercinta ini. (mt)

Daftar Isi...

Hal.1

- Dari Redaksi
- Pertemuan Konsultasi antara Anggota DPRD dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Hal.2

- Kompetisi *Line Dance*

Hal.3

- Galeri Foto Bulan Ini
- Menikmati Secangkir Kopi Mandheling

Hal. 4

- Sekilas Media

PERTEMUAN KONSULTASI ANTARA ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DAERAH DENGAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA



BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja anggota DPRD dan kepala daerah dari empat kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan ini merupakan pertemuan konsultasi antara DPRD dan pemerintah kabupaten/kota dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan pertama dilakukan oleh anggota DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Kamis, 14 April 2011. Kunjungan selanjutnya adalah oleh anggota DPRD dan Bupati Tapanuli Selatan pada Jumat, 15 April 2011 dan Kabupaten Asahan pada Selasa, 26 April 2011. Kemudian kunjungan anggota DPRD Kota Tanjung Balai pada Rabu, 27 April 2011.

Pada Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD se-Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani 19 Oktober 2010 pasal 9 sampai dengan 11 disebutkan bahwa pimpinan DPRD dapat mengajukan permintaan untuk melakukan pertemuan konsultasi dengan BPK RI.

.....bersambung ke halaman 2

KEGIATAN DHARMA WANITA

KOMPETISI LINE DANCE

Dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2011, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) Provinsi Sumatera Utara mengadakan kompetisi *line dance* pada Sabtu, 16 April 2011. Kegiatan ini dilaksanakan di auditorium kantor Ditjen PBN Provinsi Sumatera Utara, Jl. Diponegoro Medan. Tema kegiatan ini adalah "Dengan Semangat Hari Kartini Kita Bangun Kekompakan dan Kemajuan Kaum Perempuan Indonesia dalam Kebugaran Jiwa dan Raga di Acara Kompetisi Line Dance".

DWP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pun turut berpartisipasi dalam kompetisi ini bersama perwakilan dari sembilan instansi lain, diantaranya Bank Sumut, PTPN III, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim). Peserta dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari lima

orang yang diketuai oleh Sri Wiji Astuti, staf Subbagian Keuangan. Kegiatan ini berlangsung meriah, masing-masing perwakilan instansi menunjukkan kreativitasnya, baik dalam hal gerakan maupun busana yang dipakai. Di akhir kompetisi, juri menetapkan peserta dari PTPN III sebagai juara dalam kompetisi ini.

Line dance merupakan tarian yang dilakukan oleh satu kelompok kecil yang membentuk beberapa garis paralel, satu orang berada di belakang yang lain. Penari secara independen melakukan gerakannya dan tidak memerlukan interaksi dengan penari yang lain dalam kelompoknya. Namun mereka melakukan manuver gerakan pada saat yang sama. Tarian ini identik dengan musik *country* yang berasal dari Amerika dan mulai terkenal pada pertengahan abad ke-20 hingga saat ini. (dkr)



..... lanjutan hal. 1: PERTEMUAN KONSULTASI ANTARA ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DAERAH DENGAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Pertemuan konsultasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI. Untuk dapat melakukan temu konsultasi ini maka Pimpinan DPRD dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan BPK untuk mengadakan Pertemuan Konsultasi dengan menyebutkan waktu dan materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan konsultasi tersebut, DPRD dapat menyampaikan masukan-masukan maupun permintaan pemeriksaan lanjutan. DPRD juga dapat mengundang Bupati atau kepala daerah setempat untuk mengikuti Pertemuan Konsultasi tersebut. Selanjutnya pada pasal 12 kesepakatan bersama ini disebutkan bahwa pertemuan konsultasi ini dilaksanakan di kantor perwakilan BPK RI atau kantor DPRD sesuai dengan persetujuan yang dilakukan oleh kepala perwakilan BPK RI dengan pimpinan DPRD. (Ara)



GALERI FOTO BULAN INI...

Kunjungan Kerja Anggota I BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, ke Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jumat, 1 April 2011



Demonstrasi Forum Anti Korupsi (FORAK) di depan kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kamis, 28 April 2011



Menikmati Secangkir Kopi Tangkar Mandheling

Bumi Sumatera memang terkenal sebagai penghasil kopi yang tersohor hingga ke penjuru dunia. Salah satunya adalah *Kopi Mandheling*. Nama Mandheling diambil dari cara penyebutan orang-orang asing terhadap salah satu suku di Sumatera Utara, Mandailing, yang menetap di Kabupaten Mandailing Natal, 12 jam dari Kota Medan.

Disebut Kopi Takar karena penyajiannya yang unik. Takar berarti tempurung atau batok kelapa gading yang dibentuk seperti cangkir lengkap dengan tatakannya. Kopi ini memang disajikan dalam takar atau cangkir batok dan sebatang kayu manis yang dimasukkan ke dalamnya. Cara meminumnya pun unik yaitu dengan menggunakan kayu manis tersebut sebagai sedotan. Gula yang dimasukkan ke dalam kopi tersebut adalah gula aren khas Mandailing yang semakin menambah cita rasa kopi ini.

Kopi Mandheling telah tersohor ke seluruh penjuru dunia sejak jaman dahulu. Kopi ini banyak ditemui di daerah Pakantan yang saat ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Pada masa penjajahan Belanda, daerah Pakantan dijuluki

sebagai negeri Gunung Mas karena hasil kopi arabica-nya yang melimpah. Daerah ini mencapai kejayaannya pada tahun 1835 - 1945 dan berakhir pada tahun 1942 atau bersamaan dengan masuknya penjajahan Jepang ke Indonesia. Pada masa kejayaannya kopi di daerah Pakantan ditanam di dua tempat yaitu di Pakantan Dolok dan Pakantan Lombang. Hasil perkebunan kopi ini telah memberikan kemakmuran yang melimpah bagi masyarakat setempat karena harga kopi yang sangat tinggi.

Namun demikian pada saat Jepang mulai menguasai daerah ini harga kopi jatuh hingga 75 persen. Hal ini disebabkan Jepang melakukan pelarangan ekspor kopi ke luar negeri.

Saat ini kebun kopi di Pakantan masih tetap ada tetapi hasilnya tidak memadai. Setiap satu hektar hanya menghasilkan 350 kg kopi dengan harga Rp5000/kg. Hasil ini hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja walaupun kualitasnya telah dikenal sampai ke Eropa.

Sisa-sisa kebun kopi yang telah berusia ratusan tahun ini masih dapat dilihat di sekitar Gunung Aek Luane di wilayah bekas Kerajaan Pakantan Dolok yang saat ini merupakan kawasan penyangga hutan Taman Nasional Batang Gadis. Kebun kopi yang tersisa hanya sekitar lima hektar.

(dari berbagai sumber)